



Studi Kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro terkait Kritik terhadap Pemerintah Lampung Ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi dan TIK

Hanan Cahya Fidela¹, Hilmi Abdurrohman², Muhammad Rayhan Irsyad³

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia¹²³

Received: 07 Juli 2024

Revised: 19 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Abstract

Di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemahaman mengenai makna sebenarnya dari demokrasi menjadi salah satu hal yang paling penting bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi dapat memberikan jaminan atas hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan gagasan bagi setiap masyarakat yang berada di dalam lingkungan negara. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi mengenai kritikan yang berasal dari seorang tiktoker atas nama Bima kepada pemerintah kota Lampung yang dianggap telah mencederai demokrasi, khususnya jaminan dalam kebebasan berpendapat. Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian di dalam penelitian ini. Pemberitaan di media massa serta data mengenai skor indeks demokrasi Indonesia menjadi sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk bisa menghasilkan simpulan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan antara data skor indeks demokrasi Indonesia dan fakta yang terjadi di masyarakat dengan mengambil fenomena Bima sebagai salah satu contoh perbedaan data-fakta. Selain itu penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat adanya efek baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setelah fenomena ini terjadi bagi pertumbuhan demokrasi dan arus informasi di Indonesia.

Keywords: *Demokrasi, TIK, Media sosial, Provinsi Lampung, Bima Yudho*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Fidela, H., Abdurrohman, H., & Irsyad, M. (2024). Studi Kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro terkait Kritik terhadap Pemerintah Lampung Ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi dan TIK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 622-628. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13732121>

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi salah satu hal yang paling mendasar untuk dipahami secara menyeluruh bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi di dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman tentang arti sebenarnya dari demokrasi tentu tidak hanya harus dipahami oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang tentu terlibat di dalam setiap proses demokrasi yang dijalankan. Untuk melihat sejauh mana demokrasi Indonesia bertumbuh, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala memperbaharui skor indeks demokrasi Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kota. Skor indeks tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat terkait dengan capaian demokrasi yang berjalan di masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa skor indeks demokrasi Indonesia berada pada angka 80,41. Skor tersebut menandakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori “sedang” berdasarkan penilaian. Akan tetapi, di luar dari data yang menunjukkan tingkat demokrasi Indonesia yang berada pada posisi yang cukup tinggi, realitanya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah

Indonesia yang membuktikan bahwa data yang disebarkan berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di dalam lapangan.

Salah satu yang menjadi sorotan terkait demokrasi di Indonesia belakangan ini adalah terkait dengan kritik terhadap pembangunan kota Lampung dari salah satu WNI bernama Bima Yudho yang kini berada di Australia. Kritikan yang disuarakan lewat media sosial Tiktok tersebut menyoroti perihal pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan, dan tata kelola lemah yang dimiliki oleh pemerintah Lampung yang dirinya anggap tidak mengalami perubahan sejak dirinya masih kecil. Usai kritikan tersebut tersebar dan viral di seluruh media tanah air, muncul beberapa tindakan dari pemerintah yang justru mengarah pada pembungkaman atas kebebasan berekspresi yang menjadi jaminan di dalam demokrasi.

Tulisan ini bertujuan untuk memperdalam data dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui studi kasus tiktok Bima Yudho Saputro terkait kritik terhadap pemerintah Lampung yang ditinjau dari sudut pandang demokrasi dan TIK. Tulisan ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan, seperti apakah terdapat perbedaan antara data yang tersaji dan fakta yang ada di lapangan terkait skor indeks demokrasi Indonesia? Apakah kasus tersebut memberikan efek kepada pemerintah maupun masyarakat? Dan Apa yang dilakukan oleh pemerintah atas kasus tersebut dan dampaknya bagi pertumbuhan demokrasi dan arus informasi di Indonesia?

KAJIAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani: Demos (rakyat) dan Kratos (kekuasaan). Menurut International Commission of Jurist, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana pembuatan keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih saat proses pemilihan umum. Demokrasi diklasifikasikan menjadi dua jenis kelompok besar, yakni menurut cara aspirasi rakyat dan berdasarkan ideologi. Menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi digolongkan menjadi demokrasi langsung, dimana warga negara diberikan kesempatan ketika penentuan kebijakan umum maupun UU serta demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi dilakukan melalui perwakilan. Sementara itu, apabila ditinjau dari prinsip ideologinya, demokrasi digolongkan menjadi demokrasi liberal, rakyat, dan Pancasila. Demokrasi liberal lebih menekankan pada kebebasan suatu individu, demokrasi rakyat lebih menekankan pada kepentingan umum atau negara (berdasarkan pada ideologi sosialis komunis), dan demokrasi Pancasila bersumber dari nilai sosial budaya bangsa Indonesia serta falsafah Pancasila. Demokrasi merupakan tuntutan kompleks yang tidak hanya mencakup pemungutan suara, tetapi juga kebebasan diskusi dan penghormatan hak-hak hukum.

Demokrasi memiliki tiga nilai, yakni nilai intrinsik, nilai instrumental, dan nilai konstruktif. Nilai intrinsik dalam demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Nilai instrumental menyatakan bahwa demokrasi berperan penting dalam meningkatkan pendengaran yang diperoleh masyarakat sebagai tanggapan atas klaim terhadap perhatian politik. Yang terakhir, nilai konstruktif menegaskan bahwa pemerintahan

yang demokratis akan menyediakan lembaga di mana orang-orang dapat belajar satu sama lain dan membangun nilai dalam masyarakat.

B. Teori Transparansi dan Kebebasan Arus Informasi

Kebebasan yang menunjang adanya transparansi pada demokrasi tidak terlepas dari aktivitas pertukaran informasi dalam ruang publik. Pertukaran informasi dalam ruang publik di Indonesia pernah mengalami permasalahan di abad ke-20. Permasalahan tersebut terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang masih minim. Akan tetapi, saat ini, permasalahan tersebut sudah menemukan solusi dengan adanya penemuan alat teknologi yang lebih canggih dan memungkinkan adanya penyebaran informasi yang lebih cepat dan mendorong adanya intensitas pertukaran opini yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi dalam demokrasi tentunya tetap membutuhkan faktor kunci, yakni pemahaman mengenai konteks dan penggunaan big data sebagai katalis interaksi masyarakat di masa yang akan datang. Terlepas dari manfaat dan kegunaannya, adaptasi teknologi dalam demokrasi tak terkecuali tetap menimbulkan konsekuensi yang harus mendapat perhatian secara serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masifnya arus informasi yang beredar menuntut adanya transparansi yang lebih tinggi disertai kebutuhan akan pengambil keputusan yang terlatih secara keilmuan.

C. Teori Media Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi membawa pada munculnya media sosial sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat saat ini. Hadirnya media sosial yang semakin variatif mengakibatkan keragaman pada penggunaannya pula. Menurut Kevin Popovic (2016), pengguna media sosial digolongkan menjadi tujuh, yaitu creator, conversationalists, critic, collector, joiner, spectator, dan inactive. Creator merupakan golongan pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk mengunggah publikasi kepada masyarakat luas (blog, artikel, foto, video), conversationalists merupakan pengguna yang sering bertukar pikiran dan melakukan forum diskusi, critic merupakan pengguna yang seringkali memberikan opini hasil membaca personal terkait peristiwa tertentu, collector merupakan pengguna yang mencari suatu informasi lebih dalam melalui notifikasi kanal website, joiner merupakan pengguna yang menggunakan multifungsi lebih dari satu jenis media untuk memperoleh informasi, spectator merupakan pengguna yang hanya memperhatikan unggahan orang lain, dan inactive merupakan pengguna yang memiliki interaksi minim dan mengakses informasi dari media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (Semiawan, 2010). Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti akan melakukan analisis pada studi kasus topik penelitian yang didukung fakta yang bersumber dari media sosial serta data terkait indeks demokrasi Indonesia yang akan digunakan untuk melakukan komparasi terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rangkuman Kasus

Salah satu pengguna media sosial TikTok bernama akun @awbomaxreborn dengan nama asli Bima Yudho Saputro dilaporkan ke pihak berwenang akibat videonya yang viral berisi kritikan terhadap pemerintah Lampung. Inti dari video tersebut adalah infrastruktur (terutama jalan raya) yang terbatas, sistem pendidikan dan tata kelola lemah, dan ketergantungan terhadap sektor pertanian. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang disampaikan terkesan menyebar ujaran kebencian, SARA, kasar, frontal, dan pedas. Hal ini ditandai dengan sebutan “Dajjal” dalam videonya yang pada akhirnya memancing Gindha Ansori untuk melaporkan Bima ke Polda Lampung. Lain halnya dengan tindakan yang diambil oleh LBH dan AJI Bandar Lampung. Kedua lembaga tersebut malah menilai bahwa video Bima merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan beropini yang menjadi bagian dari HAM, sehingga negara perlu melindungi hak tersebut.

B. Keterkaitan Teori dengan Kasus

Tindakan yang dilakukan oleh Bima merupakan bentuk implementasi nyata dari penerapan demokrasi dan TIK. Aspek demokrasi dalam kasus tersebut dibuktikan dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat didorong dengan adanya perkembangan TIK yang memungkinkan adanya penyebaran informasi terkait kondisi di Lampung. Bima memanfaatkan arus informasi tersebut untuk mengeluarkan opini dan kritiknya di media sosial dengan harapan masyarakat luar mengetahui apa yang terjadi di Lampung. Apabila ditinjau dari nilai-nilai demokrasinya, tindakan Bima tersebut merupakan implementasi dari nilai instrumental. Hal ini disebabkan adanya prinsip demokrasi yang menyebabkan Bima dengan leluasa berpendapat dan meningkatkan pendengaran masyarakat melalui opininya tentang kondisi Lampung, sehingga masyarakat Lampung secara tidak langsung dapat lebih terbantu untuk menyuarakan aspirasinya. Dilihat dari golongannya sebagai pengguna media sosial, sudah jelas bahwa Bima merupakan golongan critic. Sebab, dalam kontennya yang viral beberapa waktu lalu, inti dari video tersebut didominasi oleh kritiknya terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Dengan gaya bahasanya yang cenderung kurang sopan, Bima melontarkan opininya mengenai “kebobrokan” pemerintah Lampung dengan infrastruktur yang kurang layak sebagai indikator utamanya. Sementara itu, kasus dilaporkannya Bima tersebut menjadikan bukti bahwa tidak ada kesesuaian antara indeks demokrasi Indonesia dengan implementasinya terhadap masyarakat. Jika Indonesia tergolong sedang dan mengalami peningkatan, kasus Bima tentunya tidak sampai ke ranah hukum, tetapi cukup diberikan saran dan umpan balik yang bersifat konstruktif dan dikaitkan dengan tutur bahasanya saja, bukan tentang esensi kritiknya.

Kebebasan berpendapat akibat adanya arus informasi yang beredar ternyata tidak selalu berjalan mulus. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya peristiwa pelaporan video Bima ke pihak berwenang akibat kritiknya. Ketidaksesuaian antara indeks prestasi demokrasi yang diperoleh dengan fakta lapangan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah selaku mandat rakyat untuk menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, beberapa hal perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebagai solusi atas ketidaksesuaian tersebut. Pemerintah seharusnya mampu membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk andil dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui demokrasi yang dilakukan dalam bentuk saran maupun kritik. Dengan adanya saran dan kritik

tersebut, pemerintah sebaiknya lebih terbuka dan harus menerimanya sebagai masukan yang konstruktif dan menjadi bahan evaluasi jajarannya untuk memperbaiki kesalahan yang ada serta membuat perencanaan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai mekanisme memberi saran atau kritik kepada masyarakat, mulai dari teknisnya, etika penyampaian, tutur bahasa yang digunakan. Jangan sampai kritik dan saran tersebut malah menimbulkan provokasi akibat adanya unsur SARA dan kata-kata yang tidak sopan. Dengan demikian, adanya kolaborasi antara kebijakan dan regulasi pemerintah serta peran dan ketaatan masyarakat akan mendorong penerapan demokrasi yang sesuai.

C. Analisis Solusi terhadap Kasus

Kebebasan berpendapat akibat adanya arus informasi yang beredar ternyata tidak selalu berjalan mulus. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya peristiwa pelaporan video Bima ke pihak berwenang akibat kritiknya. Ketidaksesuaian antara indeks prestasi demokrasi yang diperoleh dengan fakta lapangan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah selaku mandat rakyat untuk menyelenggarakan negara.

Oleh karena itu, beberapa hal perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebagai solusi atas ketidaksesuaian tersebut. Pemerintah seharusnya mampu membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk andil dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui demokrasi yang dilakukan dalam bentuk saran maupun kritik. Dengan adanya saran dan kritik tersebut, pemerintah sebaiknya lebih terbuka dan harus menerimanya sebagai masukan yang konstruktif dan menjadi bahan evaluasi jajarannya untuk memperbaiki kesalahan yang ada serta membuat perencanaan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai mekanisme memberi saran atau kritik kepada masyarakat, mulai dari teknisnya, etika penyampaian, tutur bahasa yang digunakan. Jangan sampai kritik dan saran tersebut malah menimbulkan provokasi akibat adanya unsur SARA dan kata-kata yang tidak sopan. Dengan demikian, adanya kolaborasi antara kebijakan dan regulasi pemerintah serta peran dan ketaatan masyarakat akan mendorong penerapan demokrasi yang sesuai.

KESIMPULAN

A. Penutup

Masyarakat menjadi lebih bebas untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah ketika merasa 'dirugikan' oleh beberapa permasalahan, seperti infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, dampaknya bagi pemerintah adalah mendapatkan citra positif dari masyarakat lokal maupun dunia internasional karena berhasil melaksanakan prinsip demokrasi kepada rakyatnya. Pemerintah mampu mendapatkan bahan evaluasi dengan lebih cepat melalui masyarakat langsung, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kritik dan saran yang beredar tanpa adanya SARA dapat menciptakan ketertiban antarmasyarakat, terkesan lebih sopan dan enak ketika dibaca akibat penggunaan tutur bahasa yang santun, dan serta isi dari kritik yang disuarakan dapat tersampaikan dengan baik.

B. Kesimpulan

Pentingnya pemahaman akan konsep demokrasi dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mengaitkannya dengan sebuah kasus kritik terhadap pemerintah daerah yang viral di media sosial. Mulai dari pendahuluan yang menggarisbawahi pentingnya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, teori tentang demokrasi, transparansi, kebebasan informasi, hingga kajian teori mengenai media sosial, teks itu menguraikan bagaimana demokrasi sebagai konsep melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan peran teknologi dalam proses tersebut.

Studi kasus tiktoker Bima Yudho Saputro menjadi fokus analisis terkait implementasi demokrasi dan TIK. Video kritiknya terhadap pemerintah Lampung melalui media sosial menciptakan dinamika antara kebebasan berekspresi dan tanggapan dari pihak berwenang serta masyarakat. Namun, kontroversi muncul karena bahasa yang digunakan dalam kritiknya dianggap kasar dan mengandung ujaran kebencian. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan perbedaan antara indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dengan kenyataan lapangan. Meskipun indeks menunjukkan peningkatan, implementasinya di lapangan seringkali berbeda, seperti respons terhadap kritik yang dilakukan Bima yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi.

C. Rekomendasi Lebih Lanjut

Sudah sepantasnya, pemerintah melalui lembaga-lembaga yang diberi wewenang dan masyarakat sama-sama berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pencapaian transparansi dan kebebasan berpendapat demi merealisasikan demokrasi. Pemerintah harus melakukan kewajibannya sebagai penyedia informasi publik disertai dengan penerimaan reaksi-reaksi dalam masyarakat terhadap informasi tersebut sebagai acuan untuk berkembang lebih baik. Sebagai masyarakat, tentunya juga perlu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima dan tetap mengutamakan tata krama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Skor Indeks Demokrasi Indonesia. Retrieved November 27, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/34/2160/1/-metode-baru-aspek-indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi.html>
- Cahyo, A. D., Fitriyantica, A., & Hermawan, M. B. (2023). ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA). *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 219-231.
- Darmawan, R. K. (2023, April 17). *Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju" Halaman all - Kompas.com*. Regional - KOMPAS.com. Retrieved December 6, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/224347478/kronologi-tiktoker-bima-dipolisikan-usai-bikin-video-alasan-kenapa-lampung?page=all>
- Dunan, A. (2020). Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Hubungan Masyarakat dan Demokrasi. *Jurnal Pekommas*, Vol. 5, 74.

- Fallahnda, B. (2023, April 17). Kronologi Kasus Bima Tiktok: Kritik Lampung hingga Dipolisikan. Retrieved from <https://tirto.id/kronologi-kasus-bima-tiktok-kritik-lampung-hingga-dipolisikan-gER5>
- Farhan, M. A. (2023). Reputasi Pemerintah Provinsi Lampung Setelah Unggahan Bima di Laman Sosial Media Tik Tok. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7), 2010-2015.
- Firdaus, S., Naila, N., Pramesti, A. D., Sari, C. K., Azzahra, D. F., & Angela, D. (2024). Tiktok Sebagai Media Sosial dalam Melakukan Kritik terhadap Pembangunan di Lampung. *Indonesian Journal of Social Development*, 1(2), 13-13.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Iqbal, M. (2023). Analisis Framing Berita Kasus Tuduhan Pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap TikTokers Bima Kritik Lampung di Media Online Detik. com dan Kompas. com. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 16-27.
- Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo.
- Tranggono, T., Duhri, M. R., Qusyairi, D. A. Z., Puspa, N. A., Syawalita, T. K., Artanti, D. M., & Kusumaningrum, E. W. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH ASPIRASI MASYARAKAT. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2155-2164.